



Dominasi Transaksi Mata Uang Kina di Pasar PLBN (Pos Lintas Batas) Perbatasan RI-PNG

Muhamad Zainal Abidin^{1*}, Siti Qamariah Tiflen²

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia^{1,2}

zainal.abidin@iainfmpapua.ac.id¹, sitkom@gmail.com²

**Corresponding Author*

Received: December 5, 2024; Revised: December 20, 2024; Published: December 30, 2024

Abstract

This study examines the phenomenon of Kina currency usage in transactions at border markets between Indonesia and Papua New Guinea, specifically in the Papua region, and its economic implications for Rupiah stability. Although official regulations designate the Rupiah as the only legal tender in Indonesia, the reality shows that most transactions at the border markets are conducted using Kina. The study employs a qualitative descriptive approach, focusing on traders and consumers at the border markets to identify factors influencing the dominance of Kina usage. The findings indicate that Kina's dominance is driven by several key factors, including weak enforcement of monetary policies, limited financial infrastructure, and cultural preferences that favor the use of Kina. This dominance negatively impacts the local economy and poses a potential threat to Rupiah stability in the long term. The study recommends strengthening financial infrastructure in border areas and enhancing monetary education for the community regarding the importance of using Rupiah as part of maintaining national economic sovereignty. These findings are expected to provide insights for policymakers in formulating more effective strategies to maintain economic stability at the Indonesia-Papua New Guinea border and to increase compliance with Indonesia's monetary policies.

Keywords: *Border Market, Kina, Rupiah, Monetary Policy, Indonesia-Papua Border*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan mata uang Kina dalam transaksi di pasar perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea, khususnya di wilayah Papua, serta implikasi ekonomi yang ditimbulkannya terhadap stabilitas Rupiah. Meskipun regulasi resmi menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, kenyataannya sebagian besar transaksi di pasar perbatasan dilakukan menggunakan mata uang Kina. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pedagang dan konsumen di pasar perbatasan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dominasi penggunaan Kina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi Kina disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain lemahnya penegakan kebijakan moneter, keterbatasan infrastruktur keuangan, dan preferensi budaya masyarakat yang lebih mendukung penggunaan Kina. Dominasi penggunaan Kina ini berdampak negatif terhadap perekonomian lokal dan berpotensi mengancam stabilitas Rupiah dalam jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur keuangan di kawasan perbatasan dan peningkatan edukasi moneter kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan Rupiah



sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan moneter Indonesia.

Keywords: *Pasar Perbatasan, Kina, Rupiah, Kebijakan Moneter, Perbatasan*

PENDAHULUAN

Di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG), terdapat pasar yang menjadi tempat interaksi antara budaya dan dinamika ekonomi kedua negara. Salah satu fenomena unik yang muncul di pasar perbatasan ini adalah dominasi penggunaan mata uang Kina, mata uang resmi PNG, oleh para pembeli asal PNG dalam transaksi jual beli, tanpa terlebih dahulu menukarkannya ke Rupiah. Meskipun secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia (Vanani & Suselo, 2021), praktik ini tampaknya tetap berlangsung tanpa pengawasan yang ketat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia di wilayah perbatasan sekaligus memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Fenomena dominasi mata uang Kina ini telah dibahas dalam sejumlah penelitian yang mengkaji aspek budaya perbatasan, perdagangan lintas batas, serta dampak ekonomi lokal di wilayah perbatasan. (Lay & Wahyono, 2018; Mamentu & Rares, 2019; Mangku & others, 2017) mengidentifikasi bahwa interaksi ekonomi di wilayah perbatasan sering kali didominasi oleh faktor sosial-budaya yang mengarahkan preferensi pembayaran, terutama di kawasan dengan interaksi antarnegara yang tinggi. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan bahwa praktik penggunaan mata uang Kina di pasar perbatasan RI-PNG bukan sekadar fenomena ekonomi tetapi juga mencakup implikasi sosial dan kultural yang lebih luas.

Meskipun demikian, pemahaman yang mendalam mengenai penyebab dominasi Kina di wilayah ini serta dampaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini berusaha menyumbangkan kebaruan dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang mungkin belum sepenuhnya terungkap dalam literatur yang ada, khususnya terkait dengan dinamika transaksi mata uang, interaksi lintas budaya, dan pengaruhnya terhadap kedaulatan ekonomi lokal. Hal ini penting mengingat wilayah perbatasan RI-PNG merupakan titik strategis yang mencerminkan ketahanan ekonomi dan budaya Indonesia di tengah arus perdagangan lintas batas (Affandy, 2017; Marlissa et al., 2021).

Penelitian ini menyoroiti beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama dominasi Kina dalam transaksi di pasar perbatasan RI-PNG, yaitu: (1) kurangnya akses atau ketidaktahuan pembeli asal PNG mengenai fasilitas penukaran uang (money changer), (2) kebiasaan masyarakat PNG yang terbiasa menggunakan Kina dalam aktivitas lintas batas, dan (3) rendahnya kesadaran akan aturan resmi mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya akan memberikan jawaban atas dominasi penggunaan mata uang Kina tetapi juga akan menggambarkan

dampak sosial, ekonomi, dan kultural yang diakibatkan oleh praktik tersebut di wilayah perbatasan ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari dominasi Kina di wilayah perbatasan RI-PNG, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola perdagangan lintas batas dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

KAJIAN LITERATUR

Perekonomian Wilayah Perbatasan

Menurut hamid dalam (Yosada, 2020) wilayah perbatasan merupakan wilayah yang strategis karena merupakan cikal bakal titik tumbuh bagi perekonomian nasional maupun regional. Dikawasan perbatasan ini kegiatan perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga mendorong aktivitas perekonomian Masyarakat yang berujung pada kesejahteraan Masyarakat.

Dalam UU Nomer 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam Bab VI pasal 55 dikatakan bahwa: 1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan ; 2) Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; 3) perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 56 berbunyi : Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat : 1) Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; jenis barang yang diperdagangkan; 2) Nilai maksimal transaksi pembelian barang diluar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean; 3) wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan dan kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan. Blater mengatakan bahwa perdagangan didalam wilayah perbatasan memberikan kontribusi untuk Pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dibuktikan dengan aktivitas yang mampu mengeluarkan Masyarakat dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan status social ekonomi keluarga serta dapat memberikan sumber penghasilan rumah tangga (Mamentu & Rares, 2019)

Mata uang dan Dampak Ekonomi

Nilai tukar mata uang merupakan harga satu unit mata uang asing yang terkonversi dengan mata uang domestik. Sedangkan Mankiw mengatakan bahwa nilai tukar kedua negara merupakan harga yang disepakati oleh negara tersebut untuk saling berdagang (Christianingrum, 2019). Menurut Mankiw dalam (Novianti, 2009) mengatakan bahwa dalam nilai tukar mata uang di suatu Negara mengalami perubahan substansial karena dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Jika mata uang mengalami kenaikan nilai tukar dengan mata uang lain maka mata uang suatu Negara dikatakan mengalami apresiasi.



Begitu sebaliknya jika mata uang suatu Negara mengalami penurunan terhadap nilai tukar dengan mata uang Negara lain maka penurunan tersebut mengalami depresiasi

Motive

Menurut Schiffman dalam (Tamubae et al., 2020) mengatakan bahwa motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori besar yaitu:

1. Teori Freud yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuatan dalam psikologi seseorang membentuk perilaku manusia yang tidak disadari dan tidak dapat memahami motivasi dirinya sendiri.
2. Teori Maslow, yang mengatakan bahwa motivasi tersusun dalam hirarki dari yang paling mendesak sampai dengan kurang mendesak
3. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor), teori ini berkaitan dengan faktor yang menyebabkan kepuasan dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan.

Rasionalitas

Rasionalitas Max Weber dalam (Erfan, 2021) membedakan rasionalitas dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : a) Tujuan rasionalitas yang menyebabkan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada tujuan tindakan, cara mencapainya dan akibatnya.; b) Nilai rasionalitas, nilai rasionalitas ini mempertimbangkan nilai atau norma yang membenarkan atau menyalahkan cara tertentu dalam mencapai tujuan.

Menurut (Coleman, 2013) rasionalitas yang dimaksud yaitu adanya perubahan sosial yang dilakukan karena adanya kejadian makro yang dipengaruhi oleh faktor internal individual. Sedangkan interaksi antara individu dianggap akibat dari fenomena yang mengemuka pada tingkatan system dan tidak dapat diprediksi oleh individu tersebut. Dari teori tersebut kita ketahui bahwa rasionalitas itu dapat dibentuk oleh suatu system dikarenakan kecenderungan manusia itu mengikuti kebiasaan umum yang terjadi didalam komunitas atau masyarakat tertentu. Tetapi dalam pilihan rasionalitas Coleman mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang mengarah pada satu tujuan yang diinginkan, tindakan tersebut ditentukan oleh nilai dan pilihan individu (Rejeki, 2016).

Tetapi pada kenyataannya bahwa setiap individu tidak bertindak atau berperilaku rasional dikarenakan terdapat pemaksaan terhadap tindakan (George Ritzer, 2012) yaitu : 1) Keterbatasan sumber daya ; serta 2) tindakan individu itu sendiri terhadap respon lingkungan sosial.

Dominasi Sosial Ekonomi

Dominasi merupakan penguasaan yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lebih lemah. Dominasi dalam social dan ekonomi merupakan hal yang berhubungan antara satu dan lainnya. Dalam masalah dominasi sosial Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok subordinat dan kelompok dominan. Sedangkan dalam dominasi ekonomi merupakan sebuah penguasaan dalam bidang ekonomi yang menjadikan kelompok kuat dan kelompok lemah. Dalam kesenjangan ekonomi tersebut menjadi penyebab adanya

kelas-kelas social yang ada di dalam Masyarakat seperti kelas atas, menengah dan kelas bawah (Kusumayanti et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami fenomena penggunaan mata uang asing (Kina) dalam transaksi di pasar perbatasan RI-PNG secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada deskripsi dan analisis fenomena sosial di lingkungan alaminya, memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif dari para pelaku secara langsung.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah pembeli dan penjual yang berinteraksi di pasar perbatasan RI-PNG. Mereka dipilih sebagai subjek karena merupakan pelaku utama yang secara langsung terlibat dalam kegiatan jual beli yang menjadi inti dari penelitian ini. Sementara itu, objek penelitian berfokus pada penggunaan mata uang asing (Kina) sebagai alat transaksi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, khususnya di area PLBN (Pos Lintas Batas Negara) RI-PNG.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi jual beli serta penggunaan mata uang Kina di lapangan. Wawancara mendalam dengan pembeli dan penjual dilakukan untuk mendapatkan informasi rinci mengenai alasan dan praktik penggunaan mata uang asing tersebut. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi yang relevan, seperti laporan atau data dari instansi terkait.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Proses ini melibatkan pengecekan dan perbandingan hasil temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, validitas temuan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, di mana data yang tidak relevan dieliminasi untuk memfokuskan analisis. Kedua, penyajian data dilakukan untuk menyusun data secara sistematis. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil analisis data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), khususnya di wilayah Papua, fenomena ekonomi yang menarik perhatian adalah dominasi mata uang kina (PGK) dalam transaksi perdagangan. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi ekonomi dan sosial bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan adanya dominasi mata uang kina di pasar perbatasan Indonesia-PNG, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap perekonomian lokal dan stabilitas mata uang rupiah (IDR).

Faktor-faktor Dominasi Mata Uang Kina di Pasar Perbatasan



<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i2.1845>

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pasar perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, terutama di wilayah Papua, menunjukkan penggunaan mata uang kina yang lebih dominan dibandingkan dengan rupiah. Berdasarkan observasi dan wawancara, mayoritas transaksi di pasar perbatasan dilakukan menggunakan kina. Hal ini menunjukkan bahwa kina lebih diterima dan dianggap lebih menguntungkan oleh pedagang dan masyarakat setempat dibandingkan dengan rupiah.

Penggunaan kina dalam transaksi bukan hanya terbatas pada perdagangan barang-barang konsumsi, tetapi juga dalam pembayaran jasa seperti transportasi darat (ojek) dan transaksi lainnya. Misalnya, pedagang di pasar perbatasan lebih memilih menerima kina karena stabilitas nilai tukarnya yang lebih tinggi dibandingkan rupiah. Penggunaan rupiah hanya dilakukan saat Masyarakat memiliki uang dari sisa transaksi jual beli di Kota Jayapura, seperti halnya saat masyarakat Papua Niugini berkunjung ke Kota Jayapura untuk membeli beberapa keperluan yang mengharuskan bertransaksi menggunakan Rupiah, sehingga saat kembali mereka memiliki kelebihan uang sisa, sehingga transaksi menggunakan rupiah di perbatasan digunakan masyarakat PNG saat memiliki kelebihan atau uang sisa belanja. Tetapi jika tidak berbelanja ke Jayapura dan hanya di wilayah perbatasan mereka tetap menggunakan Kina tanpa menukarkan ke dalam bentuk mata uang Rupiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata uang kina lebih dominan digunakan di pasar perbatasan Papua, Indonesia dibandingkan dengan rupiah. Hasil wawancara dengan ibu haryati saat dikonfirmasi terkait pembayaran menggunakan mata uang kina ibu haryati mengatakan :

“Karena rata-rata pembeli merupakan WNA (warga asli PnG) sehingga mengharuskan toko/pasar menjual produk bernilai Kina dan menggunakan mata uang kina dibandingkan Rupiah”.

Dari konfirmasi di atas, bahwa penggunaan mata uang kina biasa digunakan untuk transaksi jual beli di pasar perbatasan RI-PNG. Fenomena ini tidak hanya terlihat dalam transaksi perdagangan barang, tetapi juga dalam pembayaran jasa seperti transportasi dan transaksi informal lainnya.

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Erat kaitannya dengan masalah sosialisai dan edukasi ini terlihat pada saat wawancara yang dilakukan dengan beberapa penjual yang mengkonfirmasi kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun Lembaga yang berkaitan dengan Perbatasan wilayah RI dan PNG apalagi terkait mata uang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan pedangan di pasar perbatasan RI-PNG :

“Pemerintah di perbatasan belum ada sosialisasi mengenai penukaran atau bagaimana cara indonesia melakukan pembayaran rupiah”

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penggunaan mata uang rupiah di kawasan perbatasan menjadi salah satu faktor utama. Masyarakat dan pedagang lokal tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan moneter dan keuntungan menggunakan rupiah. Edukasi mengenai stabilitas mata uang nasional dan dampak penggunaan mata uang asing perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada kina.

2. Kurangnya Penegakan Hukum

Hasil interview dengan ibu ningsih sebagai pedagang, peneliti menanyakan apakah ada sanksi dari pemerintah jika kina dijadikan alat tukar di pasar perbatasan, padahal secara aturan, jika berbelanja di wilayah NKRI harus menukarkan mata uang asing ke rupiah. Ibu ningsih menjawab :

"Betul, Pak. Kalau sesuai aturan, seharusnya memang begitu, tapi di sini aturan itu seperti tidak berlaku. Kami sebagai pedagang tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau memberikan sanksi terkait hal ini. Jika mereka berbelanja ke Kota mereka baru menukarkan uang kinarya ke rupiah, tapi jika belanja di pasar sini saja, mereka langsung menggunakan uang kina nya"

Penegakan hukum yang lemah terkait dengan penggunaan mata uang asing di pasar perbatasan juga menjadi faktor penting. Regulasi yang ada tidak ditegakkan dengan ketat, sehingga pedagang merasa bebas menggunakan kina tanpa takut terkena sanksi. Pengawasan yang lemah dari otoritas terkait memungkinkan terjadinya praktik-praktik perdagangan dengan mata uang asing tanpa hambatan yang berarti.

3. Kurangnya Money Changer Resmi

Ketiadaan atau minimnya jumlah money changer resmi di wilayah perbatasan menyebabkan masyarakat kesulitan menukar mata uang rupiah ke kina dan sebaliknya. *Money changer* resmi yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka lebih memilih menggunakan kina langsung dalam transaksi.

Dalam hal ini dibenarkan oleh bapak Nalo sebagai kordinator keamanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-PNG mengatakan bahwa :

"Memang di sini ada money changer tetapi hanya satu yaitu cabang BRI Koya Barat, terkadang kehabisan stok, sehingga mereka pengunjung dari PNG langsung datang ke pasar dan berbelanja menggunakan mata uang kina tanpa ada penukaran ke Rupiah, mungkin kedepan kalau bisa ditambahkan untuk stok uang atau unit lain yang legal agar balance antara sosialisasi, aturan dan Tindakan di lapangan".

Hal tersebut di atas diperkuat pendapat ibu ningsih pada tanggal 05 mei 2024 saat dilakukan wawancara yang menyatakan bahwa :

"memang ada betul untuk penukaran uang, tapi hanya satu saja pak, itupun terkadang kehabisan stok rupiah, kita saja yang disini sebagai pedagang mau tukar uang ke rupah harus kekota dulu karna dari pihak bank kehabisan stok uang rupiahnya". (Hasil wawancara dengan ibu Ningsih pada tanggal 05 Mei 2024)

Keberadaan money changer ilegal juga memperparah situasi ini, karena mereka menawarkan kemudahan dan nilai tukar yang lebih menguntungkan, meskipun melanggar hukum.



4. Budaya dan Kebiasaan Masyarakat

Budaya dan kebiasaan masyarakat di wilayah perbatasan juga berperan penting dalam dominasi kina. Masyarakat setempat yang sering berinteraksi dan melakukan perdagangan dengan penduduk Papua Nugini cenderung lebih nyaman menggunakan kina. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan sulit diubah tanpa adanya intervensi yang signifikan dari pemerintah.

Dari faktor-faktor di atas yang telah disebutkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dikalangan pedagang dan pembeli. Kurangnya *money changer*, kurangnya penegakan hukum serta kurangnya sosialisasi maka kesalahan yang terus berulang akan menjadi sebuah kebenaran. Hal ini diungkap oleh bapak awal yang mengatakan :

“Kebijakan PLBN yaitu mempunyai jadwal pasar, biasanya ramai pada hari sabtu, kemudian di hari minggu dibuka untuk para pengunjung. Dalam bertransaksi diperbolehkan menggunakan dua mata uang yaitu mata uang kina dan rupiah untuk mempermudah transaksi antar penjual dan pembeli”.

Dari keterangan bapak awal tersebut menyatakan bahwa transaksi menggunakan dua mata uang baik kina maupun rupiah diperbolehkan di pasar perbatasan RI-PNG, sehingga pedagang dan pembelipun dengan kebiasaan tersebut maka dianggap biasa saja tanpa menyalahi aturan yang berlaku di NKRI. Hal tersebut mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat di wilayah perbatasan yang memainkan peran penting dalam dominasi penggunaan Kina.

5. Keuntungan Ekonomi bagi Pedagang

Mayoritas pedagang di pasar perbatasan merasa bahwa menerima pembayaran dalam bentuk kina lebih menguntungkan secara ekonomi. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar kina yang lebih stabil dan seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah. Keuntungan ini mendorong pedagang untuk lebih memilih kina dalam transaksi mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan regulasi moneter yang berlaku. Hal tersebut diakui oleh Bapak Awal dan Bapak Yusuf yang mengatakan :

“Dampak Positifnya yaitu pasar/Toko mengalami keuntungan dengan bertransaksi menggunakan mata uang kina dibandingkan Rupiah dikarenakan, Nilai pada mata uang kina jauh lebih tinggi dibandingkan nilai mata uang Rupiah”

Pernyataan lain dari Bapak Awal, yaitu :

“Kita lebih untung di barang dan juga untung di mata uang kina”

Dari hasil wawancara di atas bahwa keuntungan ekonomi menjadi salah satu motivasi utama bagi pedagang untuk menerima pembayaran dalam bentuk Kina, bahkan memiliki dua keuntungan sekaligus yaitu keuntungan penjualan barang dan keuntungan saat penukaran uang kina ke rupiah.

Dampak Dominasi Kina di Pasar Perbatasan RI-PNG

Dominasi mata uang kina di pasar perbatasan Indonesia-PNG memiliki beberapa dampak signifikan, baik terhadap perekonomian lokal maupun stabilitas mata uang nasional.

Dampak-dampak ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi jangka panjang dari fenomena ini, dari hasil temuan penelitian yang dilakukan maka dampak terbesar yang akan terjadi pada masa mendatang diantaranya :

1. Melemahnya Mata Uang Rupiah

Salah satu dampak utama dari dominasi kina adalah melemahnya posisi mata uang rupiah di wilayah perbatasan. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan menggunakan kina, permintaan terhadap rupiah menurun.

Saat ini telah terjadi bahwa pedagang di pasar perbatasan lebih senang jika transaksi jual beli menggunakan mata uang kina, karena memiliki dua keuntungan yang didapatkan. Pedagang lebih cenderung menggunakan mata uang kina karena keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Diperbatasan pada salah satu seorang penjual gorengan mereka akan lebih senang jika pembeli menggunakan uang kina karena perbandingannya satu pisang goreng harga Rp.2000,- sedangkan jika menggunakan mata uang kina harganya satu kina, dengan kisaran Rp. 3.500,- s/d Rp. 4.000,- maka dari itu keuntungan pedagang gorengan lebih banyak dengan menggunakan mata uang kina.

Hal tersebut dikatakan oleh bapak awal saat diwawancarai yang mengatakan :

“Gorengan di sini harganya Rp. 2.000,- kalau menggunakan kina, 1 kina dapat 1 gorengan (pisang goreng dan sejenisnya), belum lagi jika harga tukar lagi tinggi lumayan itu, tapi pedagang di sini kadang juga kasih lebih-lebih, pedagang-pedangan di sini baik-baik pak...”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka kita ketahui bahwa nilai mata uang Rupiah lebih rendah dari pada nilai mata uang kina, serta jika nilai tukar berubah dan kina menguat, pedagang tersebut dapat menjual barang dengan harga yang sama dalam kina dan mendapatkan lebih banyak rupiah saat menukarkannya. Hal ini mengurangi permintaan terhadap rupiah dan berkontribusi pada depresiasi nilai tukar rupiah di wilayah tersebut.

Hal ini dapat mengurangi likuiditas rupiah di pasar lokal dan memperlemah posisinya terhadap mata uang asing lainnya. Melemahnya rupiah juga dapat berdampak pada peningkatan inflasi dan biaya hidup di wilayah perbatasan.

2. Peredaran Kina yang Luas

Banyaknya peredaran uang kina di pasar perbatasan RI-PNG diungkapkan oleh pedagang di pasar, salah satunya diungkapkan oleh bapak Ismail yang mengatakan:

“...kami di sini sudah biasa terima uang kina untuk mereka belanja dari PNG, soalnya mereka tidak memiliki uang rupiah, jadi dari PNG sana, mereka langsung datang belanja di lapak-lapak kami, dan kami pun menerima”

Banyaknya kina yang beredar di wilayah perbatasan menciptakan masalah tersendiri. Kina yang seharusnya hanya digunakan di Papua Nugini menjadi mata uang yang umum digunakan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah pasar perbatasan RI-PNG, yang dapat mengaburkan batas-batas moneter antara kedua negara. Peredaran kina



yang luas juga mempersulit pengawasan dan kontrol terhadap transaksi keuangan di wilayah perbatasan.

3. Meningkatnya Aktivitas Money Changer Ilegal

Minimnya money changer resmi memicu berkembangnya money changer ilegal yang menawarkan jasa penukaran uang dengan nilai tukar yang lebih kompetitif. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan risiko bagi masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Tanpa regulasi yang jelas, money changer ilegal dapat melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau manipulasi nilai tukar.

Hasil wawancara dengan bapak awal mengatakan:

“... Kalau di money changer BRI sini kehabisan stok uang, biasanya kita bawa turun ke Jayapura, tapi kalo mau cepat kita tukarkan saja ke kios-kios ada juga yang mau terima meskipun ada selisibnya lumayan sih, kadang 300 sampai 700 perak per kinarya..”

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya *money changer* ilegal atau tidak resmi yang diawasi oleh pihak yang berwenang, Ketika permintaan terhadap kina di perbatasan meningkat, masyarakat yang membutuhkan konversi cepat tanpa akses ke money changer resmi cenderung beralih ke penyedia layanan tidak resmi.

4. Ketergantungan Ekonomi pada Papua Nugini

Penggunaan kina yang dominan di wilayah perbatasan menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi pada Papua Nugini. Ketergantungan ini dapat melemahkan kemandirian ekonomi lokal dan membuat wilayah perbatasan rentan terhadap fluktuasi ekonomi di Papua Nugini. Jika nilai tukar kina mengalami perubahan drastis, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pedagang di pasar wilayah perbatasan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak awal, mengatakan:

“... pernah terjadi penutupan pasar beberapa waktu lalu dikarenakan warga PNG dilarang melintas oleh keamanan dari pihak PNG karena berselisih pendapat, kami sebagai pedagang merasakan sepi pemasukan, barang yang dijual tidak laku, apalagi kita tahu kalau yang membeli barang-barang kita di pasar kebanyakan dari warga PNG, jadi kita juga tidak ada pemasukan, tapi syukurlah saat ini sudah kembali dibuka, meskipun hanya waktu-waktu tertentu..”

Dari jawaban di atas maka kita dapat mengetahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar jika warga yang tinggal di PNG tidak melakukan transaksi atau jual beli di daerah pasar perbatasan RI-PNG dan mengganggu stabilitas perekonomian sekitar.

PEMBAHASAN

Dominasi mata uang kina di pasar perbatasan Indonesia-Papua Nugini adalah fenomena kompleks yang tidak hanya dipicu oleh satu faktor, melainkan oleh interaksi multidimensi antara aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Berdasarkan temuan penelitian yang

telah disajikan sebelumnya, bagian pembahasan ini akan mengupas tuntas faktor-faktor yang mendorong terjadinya fenomena ini, serta menganalisis secara mendalam implikasi yang ditimbulkannya terhadap perekonomian lokal dan stabilitas mata uang nasional. Pembahasan ini akan mengaitkan data empiris dari lapangan dengan landasan teoritis dan literatur relevan, untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan.

Faktor-faktor Dominasi Mata Uang Kina di Pasar Perbatasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi mata uang kina di pasar perbatasan bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, wilayah perbatasan memiliki karakteristik unik sebagai titik strategis yang memfasilitasi interaksi ekonomi antarnegara secara cepat. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki karakteristik khusus dalam hal ekonomi lintas batas. Menurut (Sutejo, 2006; Syahrin & Najeri, 2018) wilayah perbatasan merupakan titik strategis yang memungkinkan interaksi ekonomi antarnegara secara cepat dan mudah. Dengan demikian, dominasi kina di wilayah ini menunjukkan interaksi ekonomi yang lebih erat antara penduduk lokal dan masyarakat Papua Nugini khususnya para pedang atau penjual yang melakukan transaksi jual beli di pasar perbatasan RI-PNG.

Namun, penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI, khususnya kina, bertentangan dengan regulasi yang mengatur perdagangan perbatasan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengharuskan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, termasuk wilayah perbatasan (UU No. 7 Tahun 2014). Kelemahan dalam penegakan hukum terkait regulasi ini menjadi salah satu faktor dominasi mata uang kina, sebagaimana juga terungkap dari hasil wawancara dan observasi bahwa pedagang lebih memilih kina karena dianggap lebih stabil dibandingkan dengan rupiah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dominasi mata uang kina di pasar perbatasan Indonesia-PNG. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam aspek sosialisasi, penegakan hukum, infrastruktur keuangan, kebiasaan budaya, dan keuntungan ekonomi.

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan menjadi salah satu penyebab utama dominasi Kina. Dalam penelitian (Wibisana, 2016) menekankan bahwa regulasi yang baik di perbatasan harus disertai dengan edukasi masyarakat mengenai kebijakan moneter dan keuntungan penggunaan mata uang nasional. Namun, di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, sosialisasi yang lemah membuat masyarakat lebih memilih menggunakan mata uang Kina yang sudah dikenal dan lebih nyaman bagi mereka, meskipun bertentangan dengan regulasi nasional. Penelitian oleh (Irawati & Fidelia, 2024) menemukan bahwa ketidaktahuan tentang kebijakan mata uang lokal cenderung meningkatkan ketergantungan masyarakat pada mata uang negara tetangga. Dalam hal ini, edukasi moneter yang intensif diperlukan



agar masyarakat memahami pentingnya penggunaan Rupiah untuk stabilitas ekonomi nasional.

2. Kurangnya Penegakan Hukum

Dalam hal ini penegakan hukum yang kurang efektif juga berperan dalam memungkinkan dominasi Kina di wilayah perbatasan. Menurut UU No. 7 Tahun 2014, transaksi di wilayah Indonesia harus menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, kurangnya pengawasan dari otoritas terkait membuat pedagang merasa bebas menggunakan Kina tanpa khawatir dikenai sanksi. Dalam (Simanjuntak, 2015) menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, regulasi moneter sering kali tidak diindahkan di wilayah perbatasan, yang menyebabkan berkembangnya praktik perdagangan lintas batas yang melanggar aturan. Studi (Budi, 2016) juga menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum di wilayah perbatasan dapat menurunkan efektivitas kebijakan moneter, karena masyarakat dan pelaku ekonomi setempat tidak merasa terikat dengan regulasi resmi.

3. Kurangnya Money Changer Resmi

Dari minimnya fasilitas penukaran uang resmi atau *money changer* di wilayah perbatasan membuat masyarakat sulit menukarkan mata uang mereka sesuai dengan regulasi. Dalam (Munajat, 2022) keberadaan *money changer* resmi di wilayah perbatasan penting untuk memastikan kelancaran transaksi lintas mata uang dan mendukung penggunaan mata uang nasional. Di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, ketiadaan *money changer* resmi memaksa masyarakat untuk melakukan transaksi langsung menggunakan Kina, karena lebih praktis dan tidak memerlukan penukaran. Selain itu, berkembangnya *money changer* ilegal memperburuk situasi, karena mereka menawarkan nilai tukar yang lebih kompetitif dan akses yang lebih mudah, meskipun melanggar aturan yang ada (Umar, 2001).

4. Budaya dan Kebiasaan Masyarakat

Faktor budaya dan kebiasaan memainkan peran krusial dalam dominasi penggunaan Kina di pasar perbatasan, bahkan ketika faktor-faktor eksternal lainnya seperti penegakan hukum dan infrastruktur keuangan sudah diatasi. Masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini memiliki interaksi sosial dan ekonomi yang intensif dengan penduduk negara tetangga. Hal tersebut mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat di wilayah perbatasan yang memainkan peran penting dalam dominasi penggunaan Kina. Menurut teori rasionalitas Weber dalam (Setiawan, 2020), tindakan ekonomi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh norma dan kebiasaan sosial yang terbentuk dalam komunitas mereka.

Masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini memiliki interaksi yang intensif dengan warga negara tetangga, yang menyebabkan kebiasaan menggunakan Kina dalam transaksi sehari-hari semakin mengakar. Penelitian oleh (Nashirun et al., 2020) juga menyoroti bahwa perubahan kebiasaan ekonomi masyarakat perbatasan sulit dilakukan tanpa adanya intervensi kebijakan yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan

bahwa faktor budaya dan sejarah interaksi lintas batas memperkuat preferensi penggunaan Kina, meskipun terdapat regulasi yang mendorong penggunaan Rupiah.

5. Keuntungan Ekonomi bagi Pedagang

Selain faktor sosialisasi dan budaya, motivasi utama yang mendorong pedagang untuk menerima Kina adalah keuntungan ekonomi. Penelitian (Muftiasa et al., 2023) menunjukkan bahwa pedagang cenderung memilih mata uang yang lebih stabil dan menguntungkan untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Nilai tukar Kina yang cenderung lebih stabil dibandingkan Rupiah mendorong pedagang untuk menerima pembayaran dalam mata uang tersebut, karena memberikan keuntungan finansial lebih besar. Hal ini sejalan dengan temuan (Zaroni, 2015) yang menyatakan bahwa preferensi terhadap mata uang yang lebih kuat sering muncul di wilayah perbatasan yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Meskipun pedagang menyadari bahwa penggunaan Kina bertentangan dengan kebijakan moneter nasional, mereka tetap memilihnya karena keuntungan ekonomi yang diperoleh.

Dampak Dominasi Kina di Pasar Perbatasan RI-PNG

Dominasi mata uang kina di pasar perbatasan Indonesia-PNG memiliki beberapa dampak signifikan, baik terhadap perekonomian lokal maupun stabilitas mata uang nasional. Dampak-dampak ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi jangka panjang dari fenomena ini, dari hasil temuan penelitian yang dilakukan maka dampak terbesar yang akan terjadi pada masa mendatang diantaranya :

1. Melemahnya Mata Uang Rupiah

Teori permintaan dan penawaran dalam pasar valuta asing relevan dalam memahami dinamika ini. Ketika mata uang asing lebih banyak digunakan di pasar perbatasan, permintaan terhadap rupiah berkurang, sehingga nilai tukarnya menurun (Mohamad & Anthonius, 2022) Semakin tinggi peredaran kina, semakin lemah pula posisi rupiah di pasar. Studi dari (Firmansyah & Hendra, 2015) mengungkapkan bahwa ketergantungan ekonomi pada mata uang asing di negara berkembang dapat menyebabkan melemahnya stabilitas ekonomi jangka panjang .

Dengan demikian, untuk saat ini dampak yang ditimbulkan masih belum signifikan. Namun, jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi dari pemerintah, akan terjadi penurunan nilai mata uang rupiah secara bertahap akibat dominasi mata uang kina yang beredar.

2. Peredaran Kina yang Luas

Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa mayoritas pedagang di pasar perbatasan RI-PNG menerima transaksi jual beli menggunakan mata uang kina yang telah menjadi kebiasaan. Sehingga seolah-olah tidak terjadi permasalahan padahal Penggunaan mata uang asing yang meluas dapat mengurangi insentif bagi pengusaha lokal untuk bertransaksi dalam rupiah.



Ini memperlemah ekonomi domestik di kawasan tersebut, menurunkan daya saing rupiah, dan berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi. Studi empiris dari (Anwar, 2014) mengungkapkan bahwa ketergantungan pada mata uang asing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi jika kontrol moneter tidak dapat diterapkan secara efektif di pasar lokal.

3. Meningkatnya Aktivitas Money Changer Ilegal

Dengan berkembangnya money changer ilegal, semakin banyak transaksi yang terjadi di luar pengawasan pemerintah. Kondisi ini berpotensi menciptakan ekonomi bayangan (*shadow economy*) yang sulit diukur dan dikendalikan, menyebabkan distorsi dalam data ekonomi dan mengurangi efektivitas kebijakan moneter (Zaenuddin et al., 2012). Dalam buku (Firdausy, 2021) kegiatan ekonomi bayangan dapat mengurangi penerimaan pajak dan merusak integritas pasar yang diatur oleh negara, terutama dalam mengontrol arus keluar-masuk mata uang asing.

Money changer ilegal menawarkan akses mudah tetapi beroperasi tanpa regulasi yang jelas, sehingga menciptakan pasar paralel. Pasar informal seperti ini rentan terhadap manipulasi kurs dan menurunkan efektivitas kebijakan nilai tukar yang diterapkan oleh pemerintah (Hidayat, 2024).

4. Ketergantungan Ekonomi pada Papua Nugini

Dominasi kina di pasar perbatasan RI-PNG memperlihatkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Papua Nugini. Sehingga jika terjadi dalam jangka panjang, ketergantungan ini juga dapat menghambat upaya Indonesia untuk mengintegrasikan ekonomi perbatasan dengan ekonomi nasional, menjadikan wilayah tersebut lebih rentan terhadap perubahan ekonomi di PNG dibandingkan kebijakan ekonomi Indonesia.

Ketergantungan terhadap pembeli dari PNG mempengaruhi transaksi berupa pendorongan alat tukar atau alat transaksi dalam jual beli yaitu kina. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa dominasi mata uang asing di suatu wilayah membuatnya semakin terhubung dengan kondisi ekonomi negara asal mata uang tersebut, sekaligus mengurangi pengaruh dan efektivitas kebijakan ekonomi lokal. Jika ketergantungan ini terus berlangsung tanpa intervensi untuk memperkuat peran rupiah di perbatasan, masyarakat perbatasan akan semakin rentan terhadap kebijakan ekonomi PNG, mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut (Kareth, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab dominasi mata uang Kina di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pertama, Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan menyebabkan masyarakat setempat cenderung lebih memilih menggunakan Kina dalam transaksi sehari-hari. Kedua, lemahnya penegakan hukum, terkait regulasi penggunaan mata uang nasional

memperburuk situasi ini, karena pedagang merasa bebas untuk menerima pembayaran dalam bentuk Kina tanpa khawatir terkena sanksi. Ketiga, keterbatasan jumlah money changer resmi, di wilayah perbatasan membuat masyarakat lebih memilih menggunakan Kina secara langsung. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan mata uang negara tetangga memperkuat dominasi Kina. Terakhir, dari perspektif pedagang, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari stabilitas nilai tukar Kina dibandingkan Rupiah membuat mereka lebih memilih mata uang tersebut dalam transaksi lintas batas.

Dominasi penggunaan Kina ini juga memiliki sejumlah dampak signifikan bagi ekonomi lokal dan nasional. Pertama, melemahnya posisi Rupiah di wilayah perbatasan mengurangi permintaan terhadap mata uang nasional dan berdampak pada stabilitas moneter. Kedua, peredaran Kina yang semakin luas di wilayah Indonesia mengaburkan batas-batas moneter dan mempersulit pengawasan terhadap transaksi keuangan. Ketiga, meningkatnya aktivitas money changer ilegal menimbulkan risiko bagi masyarakat yang menggunakan jasa penukaran tanpa regulasi yang jelas. Terakhir, dominasi Kina ini juga menimbulkan ketergantungan ekonomi pada Papua Nugini yang dapat membuat ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kondisi ekonomi negara tetangga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi Kina di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan regulasi yang kompleks. Dampak dari fenomena ini tidak hanya dirasakan di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan yang terintegrasi diperlukan untuk menangani masalah ini, termasuk melalui peningkatan sosialisasi, penguatan penegakan hukum, pengembangan infrastruktur keuangan, serta upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di wilayah perbatasan.

SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai dominasi mata uang kina di pasar perbatasan Indonesia-Papua Nugini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan.

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah, khususnya lembaga seperti Bank Indonesia dan instansi terkait di perbatasan, perlu mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media lokal, pertemuan rutin dengan pedagang, atau di sekolah-sekolah di wilayah perbatasan untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Penguatan Infrastruktur Keuangan: Untuk memfasilitasi transaksi dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, pemerintah perlu menambah jumlah dan aksesibilitas fasilitas penukaran uang resmi (money changer) di area perbatasan. Hal ini juga harus disertai dengan pengawasan ketat terhadap money changer ilegal untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Ekonomi di Perbatasan

Kesadaran dan Kepatuhan: Masyarakat, terutama para pedagang, disarankan untuk



lebih sadar dan patuh terhadap regulasi yang berlaku mengenai penggunaan Rupiah. Meskipun penggunaan kina mungkin menawarkan keuntungan jangka pendek, kepatuhan terhadap mata uang nasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi di wilayah perbatasan. Pemanfaatan Layanan Keuangan Formal: Pelaku ekonomi didorong untuk memanfaatkan layanan perbankan atau fasilitas penukaran uang resmi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko penipuan dari layanan ilegal, tetapi juga membantu mengintegrasikan ekonomi lokal dengan sistem keuangan nasional.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perluasan Metode dan Jangkauan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode campuran (*mixed-method*) untuk mengukur secara lebih spesifik dampak ekonomi dari dominasi mata uang kina. Selain itu, jangkauan penelitian dapat diperluas ke pasar perbatasan lain di Indonesia, seperti perbatasan Malaysia atau Timor Leste, untuk mendapatkan data perbandingan yang lebih komprehensif.

Penggalan Variabel Baru: Peneliti selanjutnya dapat menggali variabel lain yang mungkin memengaruhi perilaku transaksi, seperti faktor psikologis, tingkat pendidikan, atau peran otoritas adat setempat dalam regulasi ekonomi informal di perbatasan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan multidimensional.

Studi Kasus Jangka Panjang: Disarankan untuk melakukan studi kasus longitudinal (*longitudinal study*) untuk mengamati perubahan perilaku transaksi dan dampak kebijakan moneter dari waktu ke waktu. Penelitian jangka panjang ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tren dan efektivitas intervensi pemerintah.

REFERENSI

- Affandy, F. F. (2017). *Praktik dagang wilayah perbatasan dalam perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea Di Kota Jayapura*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Anwar, K. (2014). *Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia*.
- Budi, S. ". (2016). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam Dalam Pembatasan Penggunaan Valas*.
- Christianingrum, R. (2019). The Effect of Macroeconomic Variables on Rupiah Exchange Rates. *Jurnal Budget*, 4(1), 43–63. <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/28>
- Coleman, J. S. (2013). *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory*. Nusa Media.
- Erfan, M. (2021). Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 54–64.

- Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah, H., & Hendra, E. (2015). Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas terhadap stabilitas nilai rupiah. *Ary-Syari'ah*, 17(2), 45–54.
- George Ritzer, D. J. G. (2012). *Teori Sosiologi*. Kreasi Wacana.
- Hidayat, A. N. (2024). *Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: Perspektif Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irawati, I., & Fidelia, F. V. "Prinsip P. K. D. P. K. U. P. V. A. B. B. (2024). *Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*.
- Kareth, N. V. J. (2022). Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas di Wilayah Perbatasan Papua dan Papua New Guinea. *Balobe Law Journal*, 2(1), 27–34.
- Kusumayanti, D. D., Mukharomah, K. N., Wijayanti, E. C., & ... (2022). Analisis Aspek-Aspek Hegemoni Dan Dominasi Sosial Ekonomi Dalam Serial 'Squid Game' The Analysis Of Hegemony And Economic Social Domination In ' *Scholar.Archive.Org*, 11(2), 135. <https://scholar.archive.org/work/qabhy2vn5bd3ig3s5wy3676ki/access/wayback/https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/article/download/33792/11744/>
- Lay, J. R. B. B., & Wahyono, H. (2018). *Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI--RDTL di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Kegiatan Perdagangan*. Universitas diponegoro.
- Mamentu, M., & Rares, J. J. (2019). Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Dan Politik Border Crossing Agreement Pada Masyarakat Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Studi Dalam Rangka Rekomendasi Revisi Kebijakan Pengaturan Pelintas Batas Indonesia--Philipina). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 4(1), 50–58.
- Mangku, D. G. S., & others. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99–114.
- Marlissa, E. R., Ratang, S. A., & Maga, L. (2021). Pengaruh Perdagangan terhadap Kesejahteraan Pedagang Masyarakat Lokal di Perbatasan RI-PNG. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(3), 564785.
- Mohamad, I. D., & Anthonius, J. K. (2022). *Pengaruh harga batubara dan nilai tukar Rupiah terhadap nilai ekspor batubara di Welbunt International Pte. Ltd Jakarta*. <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/686>



- Muftiasa, A., Wibowo, L. A., Hurriyati, R., & Rahayu, A. (2023). Kebijakan Lindung Nilai (Hedging) pada Perusahaan untuk Menjamin Kinerja Perusahaan. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 102–118. <https://doi.org/10.29080/jai.v9i1.1234>
- Munajat, E. (2022). *The Potential Of Digital Rupiah As A New Solution To Combat Corruption In Indonesian Government*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.888>
- Nashirun, Iva Ashari Ananda, & Iwan Kusnadi. (2020). Peran Pemerintah Pada Era MEA Di Kawasan Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 13–30. <https://doi.org/10.37567/sebi.v1i2.149>
- Novianti, A. (2009). Analisis pengaruh perubahan. *Fe Ui*, 9–40.
- Rejeki, S. (2016). Teori Pilihan Rasional James S. Coleman Dan Teori Kebutuhan Prestasi David McClelland. *Jurnal Ilmiah*, 43–55.
- Setiawan, I. (2020). Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pangkalan Ojek Konvensional Di Terminal Lama Wonogiri. *Lisyabab*, 1(1), 131–142. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/18>
- Simanjuntak, K. M. (2015). *Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di {Indonesia}*.
- Sutejo, B. S. "Internet marketing: konsep dan persoalan baru dunia pemasaran. (2006). *Internet marketing: konsep dan persoalan baru dunia pemasaran*.
- Syahrin, A., & Najeri, M. (2018). *China versus Amerika Serikat: Interpretasi rivalitas keamanan negara adidaya di kawasan Asia Pasifik*.
- Tamubae, A. S., Areros, W. A., & Tatimu, V. (2020). Motivasi dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Sigras. *Productivity*, 1(5), 383–389.
- Umar, H. (2001). *Strategic management in action*. Gramedia Pustaka Utama.
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 74–83.
- Wibisana, W. "Pendapat I. T. T. K. P. (2016). *Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik*.
- Yosada, K. R. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 5(2), 148–159.
- Zaenuddin, M., Istardi, D., & Ansori, M. (2012). Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam. *Jurnal Integrasi*, 4(1), 83–98.
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi islam. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–22.